

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.¹ Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus di dukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.²

¹Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Nataru Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintahan Daerah”. *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, April 2020, hal 133.

² Nur Paikah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone”, *“Ekspose”*, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 336.

Pada kenyataannya belum semua masyarakat Indonesia menyadari dan memahami sikap adil khususnya tentang hak-hak penyandang disabilitas. Hak memperoleh dan menuntut di perlakuan yang sama Pasal 5 UU HAM, setiap seorang harus diakui sebagai manusia yang pribadi, maka dari itu berhak memperoleh perlakuan juga perlindungan yang sama sesuai martabat manusia di depan hukum. Setiap seorang mempunyai hak mendapatkan bantuan juga perlindungan yang adil dari pengadilan secara objektif dan tidak boleh berpihak. adanya perlakuan dan perlindungan individu dan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan mempunyai kekhususan, yaitu: orang jompo, ada anak-anak, ada fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.³

Penyandang disabilitas ialah seorang yang di lahirkan sejak lahir atau memiliki kelainan fisik dan mental yang mengganggu atau suatu rintangan dan hambatan baginya untuk lakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya yang di lakukan oleh non penyandang disabilitas, penyandang disabilitas di bagi atas dua kelompok yaitu: 1. Penderita cacat fisik yaitu : a. Penderita cacat tubuh (anak yang berkelainan daksa, b. Penderita cacat netra (anak yang berkelainan netra), c. Penderita cacat tuna wicara kelainan pada saat bicara, d.Penderita cacat seorang menderita penyakit kronis. 2. Penderita cacat mental yaitu : a.

³Dwi Oktavia Setiawati, Thesis: “Perlindungan HAM Bagi Disabilitas Yang Menjadi Pengemudi Ojek Online” (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Hukum, 2019), hal. 5.

Penderita cacat pikiran yang lemah, atau idiot, atau kurangnya daya tangkap yang lemah, b. Penderita cacat ekss pisikotik, c. Penderita cacat fisik dan batin manusia atau watak manusia⁴

Berikut perkiraan jumlah (dalam ribuan) presentase penyandang disabilitas menurut jenis kelamin 2018 di Provinsi Banten dalam tabel 1.

Tabel 1.1

Perkiraan Jumlah (dalam ribuan) Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin di Provinsi Banten. 2019

a. Penyandang Disabilitas

No	Indikator	Jumlah			
		2017		2018	
		L	P	L	P
1	Penyandang iidisabilitas	16, 780	12,970	16,077	11,720

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Banten

b. Anak Penyandang Disabilitas

No	Indikator	Jumlah			
		2017		2018	
		L	P	L	P
1	Anak Penyandang Disabilitas	3,055	12,970	16,077	11,720

Sumber data: Dinas Sosial Provinsi Banten

⁴Dwi Oktavia Setiawati, Thesis: “Perlindungan HAM Bagi Disabilitas Yang Menjadi Pengemudi Ojek Online” (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Hukum, 2019), hal. 5.

Dari hasil data Dinas Sosial Provinsi Banten menunjukkan bahwa perkiraan jumlah penduduk penyandang disabilitas tahun 2017-2018 ada sebanyak 57,547 ribu jiwa, sedangkan perkiraan jumlah anak penyandang disabilitas tahun 2017-2018 di Provinsi Banten ada sebanyak 43,822 ribu jiwa dari seluruh penduduk Provinsi Banten (Tabel 1.1). Perbandingan menurut gender memperlihatkan bahwa jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak di bandingkan jumlah penyandang disabilitas perempuan. Sedangkan jumlah anak penyandang disabilitas menurut gender lebih banyak perempuan di bandingkan jumlah anak penyandang disabilitas laki-laki.

Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia, maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang di laksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, yang di dukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.⁵

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan

⁵Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Natara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintahan Daerah". *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, April 2020, hal 132.

masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.⁶

UU tentang konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah harapan bagi semua penyandang disabilitas di Indonesia. Program Manager ASEAN *Central Election Network for Disability Access*, Yusdiana mengatakan selama ini telah ada UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat namun implementasinya masih jauh dari harapan. Sebagai contoh kuota satu persen bagi penyandang disabilitas di perusahaan atau lembaga pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana di amanatkan UU. Bagi Yusdiana, melalui pengesahan UU tentang Konvensi ii Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka para penyandang disabilitas di Indonesia akan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat dalam hal perlindungan publik terhadap penyandang disabilitas.⁷

Aksesibilitas, sebagaimana digariskan dalam Undang-undang nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat, adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Secara operasional, ketentuan-

⁶Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Natara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintahan Daerah". *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, April 2020, hal 132..

⁷Yusdiana, *Harapan bagi Penyandang Difabel, Info Societa*, (Biro Humas Kementerian Sosial RI, 2011), Edisi IX, hal.6.

ketentuan teknis tentang aksesibilitas Pada bangunan gedung dan lingkungan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 30/PRT/M/2006. Pada esensinya, peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan hambatan arsitektural.⁸

Secara lebih komprehensif, aturan-aturan dasar tentang aksesibilitas ini tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang di ratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2011. Pasal 9 ayat 1 Konvensi tersebut menyatakan: Agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sama seperti warga lainnya, Negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas ke lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses ke fasilitas dan jasa pelayanan lain yang tersedia bagi publik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Langkah-langkah tersebut, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan aksesibilitas, di berlakukan antara lain pada: a. gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja. b.

⁸Didi Tarsidi, *Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik*. Jassi Anakku. Vol. 10 No.2, (2011), hal. 202.

informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.⁹

Di Indonesia kaum disabilitas mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan di mulai dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan.¹⁰ Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas justru tidak mendukung iitumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau *mindset* anggota keluarga yang non disabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat dapat di lakukan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dan di miliki para penyandang cacat tersebut, upaya ini sangat relevan dan harus di lakukan.

⁹Didi Tarsidi, *Kendala Umum*,

¹⁰Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. Masyarakat ASEAN Edisi 11: “Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis”, Majalah Online diakses pada tanggal 29 September 2017 dari <http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka di lakukannya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, serta mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI), adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam isu difabel, berdiri pada 24 Juli 2013 dan berkekuatan hukum yang tercatat pada akta notaris dan kantor kementerian hukum dan HAM. Yayasan Difabel Mandiri Indonesia ini bermula dari sebuah komunitas di jejaring sosial *Facebook* yang bernama Komunitas Penyandang Disabilitas Indonesia (KPDI). Komunitas ini berdiri karena perasaan senasib para anggotanya yang sebagian besar adalah difabel. Menyikapi hal tersebut, maka timbulah satu gagasan baru untuk membentuk suatu badan, yang mengelola pembinaan bantuan untuk para difabel, yang lebih terorganisir.

Yayasan Difabel Mandiri Indonesia terbentuk karena bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan pelayanan sosial melalui program-program kegiatan keterampilan dan kewirausahaan. Beberapa program kegiatan yang di tawarkan di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia yaitu program keterampilan komputer, bahasa Inggris, *handycraft*, kewirausahaan budidaya Burung Puyuh, kewirausahaan budidaya Ikan Tawar, kewirausahaan budidaya Jangkrik, seminar dan

sosialisasi penyandang disabilitas, memberikan alat bantu penyandang disabilitas, juga melakukan kemitraan kerja dengan pihak-pihak terkait guna mensejahterakan kaum disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh program kewirausahaan budidaya Ikan Tawar dan Jangkrik. Dengan adanya program kewirausahaan budidaya Ikan Tawar dan Jangkrik ini di harapkan kepada penyandang disabilitas dapat mengasah kemampuan kreatifitas yang dimiliki. Sehingga meningkatkan sumber daya manusia serta membantu kemandirian yang tidak lagi tergantung dengan orang lain, dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Oleh karena itu penelitian skripsi ini penulis tuangkan dalam judul skripsi yaitu: **“PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN IKAN AIR TAWAR DAN JANGKRIK DI YAYASAN DIFABEL MANDIRI INDONESIA KOTA TANGERANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelayanan sosial di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan kewirausahaan bagi kaum difabel di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia?

3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam berjalannya program pemberdayaan kewirausahaan di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada permasalahan yang di kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin di capai adalah:

1. Mengetahui pelayanan sosial di Yayasan Difabel Mandiri Kota Tangerang.
2. Mengetahui pemberdayaan kewirausahaan yang dilakukan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia dalam memberdayakan kaum difabel.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pelayanan sosial yang di lakukan oleh Yayasan Difabel Mandiri Indonesia dalam meberdayakan kaum difabel di Kota Tangerang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:

a. Bagi Penulis

Agar penulis atau peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan atau penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal pengembangan masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di manfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang di harapkan dapat di ambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang selaku pelayanan sosial kepada kaum difabel dalam iimemberdayakan kehidupan mereka.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di kalangan UIN SMH Banten iimaupun pihak-pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, adapun yang di gunakan untuk memperoleh itu antara lain, penelitian tentang upaya yang di gunakan dalam memberdayakan difabel, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Amirah Mukmina yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2013.¹¹ Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu warga binaan penyandang disabilitas di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan mempelajari dengan seksama pelaksanaan pemberdayaan melalui kegiatan keterampilan dan menjelaskan pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok disabilitas. Metode pelaksanaan pemberian keterampilan Yayasan Wisma Cheshire tidak memberikan kursus atau pelatihan khusus bagi para penyandang disabilitas dalam keterampilan *woodwork* ataupun *handicraft*. Keterampilan tersebut di lakukan dengan cara saling mengajarkan kepada juniornya, sehingga antara anggota/resident baik yang lama ataupun yang baru akan saling mengajarkan. Metode tersebut biasa disebut dengan metode *learning by doing* yaitu belajar sambil bekerja atau praktik.

Penelitian tersebut di atas mengkaji pemberdayaan kelompok disabilitas melalui program keterampilan menjahit yang di lakukan dengan cara saling mengajarkan kepada juniornya. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang di kaji oleh saya dalam meneliti pemberdayaan kelompok disabilitas yaitu melalui pelayanan sosial Yayasan

¹¹Amirah Mukmina, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan” (Skripsi Sarjana UIN “Syarif Hidayatullah”, Jakarta 2013).

Difabel Mandiri Indonesia yang terdapat dalam aspek kewirausahaan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Ridho Andwi Putra yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Budi Perkasa Palembang” di Universitas Sriwijaya, Palembang 2019.¹² kesimpulan yang di dapatkan skripsi tersebut yaitu, peran Balai Rehabilitasi Budi Perkasa dalam memberdayakan disabilitas dengan memberikan pelayanan sosial melalui program-program keterampilan yang nantinya akan di tekuni oleh para penyandang disabilitas fisik. Karena melalui keterampilan para penyandang disabilitas iifisik akan mampu mengoptimalkan potensi diri, mampu memotivasi diri, dan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, serta menjadikan keterampilan sebagai bekal hidup, lepas dari ketergantungan orang lain.

Penelitian tersebut di atas mengkaji pemberdayaan kaum disabilitas melalui pelayanan sosial oleh Balai Rehabilitasi Sosial Budi Perkasa Palembang, yang memperlihatkan bahwa pelayanan sosial yang diberikan hanya berfokus kepada kaum disabilitas saja, dengan memberikan pemberdayaan melalui keterampilan. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan iipada penelitian yang dikaji oleh saya dalam meneliti pemberdayaan difabel yaitu melalui program pemberdayaan kewirausahaan

¹²M. Ridho Andwi Putra, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Budi Perkasa Palembang” (Skripsi Sarjana : Universitas Sriwijaya , Palembang 2019).

budidaya Ikan Tawar dan Jangkrik di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia yang terdapat pada aspek kewirausahaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eza Yulisnaini yang berjudul “Peran Komunitas Young Voices Dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh” di UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018.¹³ Kesimpulan yang didapatkan skripsi tersebut yaitu, peran komunitas *Young Voices* Mengadvokasi hak-hak disabilitas, Kampanye terhadap kebijakan dan perubahan kebijakan, serta praktek inklusi yang mendukung para penyandang disabilitas ke dalam masyarakat yang lebih luas, Memanfaatkan media sebagai alat advokasi, Meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik dan akses ke komunikasi dan informasi untuk para penyandang disabilitas, Meningkatkan sumber daya disabilitas.

Penelitian tersebut di atas mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas pengadvokasian hak-hak disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak yang adil sesuai dengan UUD Nomor 8 Tahun 2016. Meningkatkan mutu pendidikan bagi disabilitas, agar dapat menciptakan kader-kader disabilitas sehingga memiliki kemandirian dan terampil dalam menjalankan hidup dan berperan aktif di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang di kaji oleh saya dalam meneliti pemberdayaan difabel yaitu melalui program

¹³Eza Yulisnaini, “Peran Komunitas *Young Voices* dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh”, (Skripsi Srajana: UIN “Ar-Raniry Darussalam”, Banda Aceh 2018).

pemberdayaan kewirausahaan budidaya Ikan Tawar dan Jangkrik di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia yang terdapat pada aspek kewirausahaan.

F. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.¹⁴

Pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu upaya peningkatan dan perubahan sumber daya manusia dari keadaan tidak berdaya atau keadaan yang berdaya tapi terbatas melalui proses pembangunan berkesinambungan serta dilakukan secara terorganisir dengan pengembangan, penguatan potensi, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri agar tercapai suatu kemandirian hidup.¹⁵

¹⁴ Lifa Indri Astuti, Hermawan, Mochammad Rozikin, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, 2013, hal. 1888.

¹⁵ Hayati, Miratul. Dkk, "Peranan Dinas Sosial dalam Menaggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 2, No.2, (2017)

a) Perbedaan Disabilitas dan Difabel

Secara umum, disabilitas adalah ketidak mampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, terdapat beberapa jenis disabilitas yaitu:

- 1) Disabilitas fisik, seperti gangguan gerak yang menyebabkan tidak bisa berjalan
- 2) Disabilitas sensorik, seperti gangguan pendengaran atau penglihatan
- 3) Disabilitas intelektual, seperti kehilangan ingatan
- 4) Disabilitas mental, seperti fobia, depresi skizofrenia, atau gangguan kecemasan

Sementara itu, difabel adalah istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Difabel mengacu pada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Artinya seorang difabel bukanlah tidak mampu, melainkan hanya terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu. Kondisi seorang difabel juga bisa diperbaiki dengan alat bantu yang membuatnya jadi mampu melakukan aktivitasnya.¹⁶

¹⁶“Mengenal Perbedaan disabilitas dan Difabel”, diakses pada 03 Desember 2020, dari <https://www.rsannisa.co.id/artikel/kesehatan/mengenal-perbedaan-disabilitas-dan-difabel>

b) Fungsi dan Tujuan Pemberdayaan

¹⁷Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budaya. Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Perbaikan Kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaiki Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali

¹⁷ Totok Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta 2013) hal. 109.

disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- 5) Perbaikan Kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami.¹⁸

c) Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang di miliki guna mencapai tujuan yang di tetapkan. Sebelum program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenali masalah dan potensi dari masyarakat itu sendiri. Guna merumuskan hal tersebut dan mencapai tujuan pemberdayaan, strategi menjadi bagian penting yang perlu dipersiapkan.¹⁹

¹⁸Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), cat ke-1 hal. 12

¹⁹Mulia Budi, "Mengenal Strategi dan Langkah-Langkah Pemberdayaan Komunitas", diakses 11 Februari 2021, dari <https://tirto.id/mengenal-strategi-dan-langkah-langkah-pemberdayaan-komunitas-gabV>

²⁰Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan agar tercapainya suatu tujuan. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Strategi sebagai suatu rencana
- 2) Strategi sebagai kegiatan
- 3) Strategi sebagai suatu instrumen
- 4) Strategi sebagai sistem
- 5) Strategi sebagai pola pikir

Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan, maka hal yang terpenting adalah terletak pada pelaksanaan proses/ tahapan suatu program/kegiatan, yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya karena masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi, kebutuhan utamanya, dan potensi-potensi yang dimiliki, sehingga fasilitator sebaiknya melakukan pendekatan secara *bottom up*.²¹

²⁰ Totok Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta 2013) hal. 167

²¹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan*, hal. 108.

d) Proses Pemberdayaan

Menurut Toto Mardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.²²

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Seperti halnya pemberdayaan merupakan proses pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal.²³

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses

²²Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.61.

²³Binti Isnaul Hasanah, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDES Srikandil Desa Tunggari Kalidawir Tulungagung", (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2019) hal. 16.

pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.²⁴

Sedangkan menurut Hogan yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima (5) tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan. (*recall depowering/empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*)
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem for project*)
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (*identify useful power bases*) dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*)²⁵

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan yang dikemukakan oleh Hogan di atas tentunya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari satu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji

²⁴Binti Isnaul Hasanah, *Pemberdayaan Masyarakat*,, hal. 17-18.

²⁵Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 212.

faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).²⁶

e) Konsep Pemberdayaan Dalam Islam

prinsip pemberdayaan dalam Islam berkaitan dengan beberapa hal, yaitu :

- a. Prinsip kepedulian, sebagai bentuk pengejawantahan konsep tauhid dari ajaran Islam
- b. Prinsip keadilan, keadilan dalam hidup akan berjalan dengan baik jika di iringi dengan dengan aktualisasi nyata.
- c. Prinsip kesamaan, semua manusia sama sehingga setiap manusia di larang untuk menganggap diri paling berdaya.²⁷

Semua itu dilakukan dengan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

Kaum difabel sering kali menjadi sorotan masyarakat sebagai golongan minoritas yang sering kali di anggap rendah dan asing serta tidak mendapatkan hak dan perhatian yang penuh dari masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an untuk tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang dalam keadaan cacat atau

²⁶Amirah Mukminina, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan", (Skripsi Sarjana UIN "Syarif Hidayatullah", Ciputat, 2013), hal. 29.

²⁷Achmad Saefullah dan Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam", *Syar'i*, Vol. 3(februari 2020) hal. 8-10

sempurnanya, karena semua manusia di mata Allah itu sama yang di nilai hanya ketaqwaan dan keimanan. Sebagaimana lebih jelasnya di ijelaskan dalam surah Al-Hujurah ayat 13 :

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ وَجَعَلْنَكُمْ وَأَنْثَىٰ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ أَنْتُمْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya:"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat diatas menjelaskan secara tegas Allah SWT melarang segala bentuk tindakan merendahkan atau kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Pentingnya rasa toleransi dan kesadaran perlu di wujudkan dan di tingkatkan agar manusia tidak semena-mena melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, atau tindakan sejenis lainnya. Karena tindakan ini akan memunculkan perpecah belahan bangsa.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang

disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.²⁸

Di Indonesia, istilah yang paling lama dan terpopuler adalah “penyandang cacat”. Disability dianggap sebagai “cacat” atau kekurangan dari apa yang seharusnya (normal). Istilah ini juga masih digunakan oleh Perda Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2011, yakni: Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik.²⁹

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik

²⁸ Eko Riyadi dkk., *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta. 2012, hlm. 293

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat (1).

dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.³⁰

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai mengubah paradigma penanganan terhadap permasalahan penyandang disabilitas, yang semula dengan melaksanakan pendekatan kesejahteraan sosial telah diubah menjadi pola penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak. Tentunya perubahan ini harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.³¹

Kemudian menurut Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang telah di ratifikasi dan disahkan oleh Undang-Undang, disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan

³⁰ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³¹ UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.³²

Undang-Undang tentang disabilitas telah menjelaskan secara jelas istilah disabilitas itu sendiri, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelktual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³³

a. Klasifikasi Disabilitas

Klasifikasi penyandang disabilitas di bedakan berdasarkan parah, sedang dan ringannya jenis kecacatan yang di derita. Semakin parah seseorang membuat orang tersebut membutuhkan banyak bantuan untuk bisa berpatisipasi aktif dalam aktifitas sosial. Pada kondisi ini penyandang disabilitas membutuhkan adanya bantuan baik alat maupun fasilitas umum lainnya yang akan memudahkan bagi mereka dalam menjalankan aktifitas pribadi maupun sosial.³⁴

³² UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

³³Tim Indepth Rights PPRBM Malang, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, (Malang: CBM, 2016), hal. 8.

³⁴Kementrian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, (Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015) hal. 19.

Definisi penyandang cacat menurut Undang-Undang RI Pasal 4 ayat 1 No. 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:³⁵

- 1) **“Penyandang Disabilitas fisik”** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) **”Penyandang Disabilitas intelektual”** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- 3) **“Penyandang Disabilitas mental”** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian dan
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- 4) **“Penyandang Disabilitas sensorik”** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara

³⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*

lain disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas wicara³⁶

b. Faktor Penyebab

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, ditengarai akan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas akibat meningkatnya gangguan kesehatan akibat penyakit kronis degeneratif.

Badan kesehatan dunia WHO merilis data bahwa setidaknya ada 40-50 juta penderita kebutaan (tunanetra) / gangguan penglihatan. Pertahunnya tidak kurang dari 7 juta orang mengalami kebutaan atau perorang mengalami kebutaan perduabelas menit (Djunaedi, 2010). Sedangkan menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 yang terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunaganda. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang tunanetra.³⁷

³⁶Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, No. 2, (Oktober 2019), hal. 138.

³⁷ Jerry J Tula, "Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksesibilitas". Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. (16 September 2015), dalam <http://www.kemosos.go.id>, diakses tgl 24 Februari 2016.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penyandang disabilitas di bagi menjadi tiga periode yaitu:

I. Sebelum kelahiran (pra-natal)

Sebelum kelahiran (pra-natal) adalah masa bayi masih dalam kandungan ibunya. Adapun faktor penyebab terjadinya penyandang disabilitas antara lain:

- a. Gangguan genetika
- b. Infeksi kehamilan
- c. Ibu termasuk kelompok ibu hamil berisiko tinggi
- d. Faktor keturunan
- e. Keracunan saat hamil
- f. Bayi prematur
- g. Sinar-X
- h. Penyakit

II. Selama proses kehamilan

Proses kehamilan merupakan masa yang sangat sensitif, sesuatu akan berdampak pada janin apabila mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Beberapa proses kelahiran yang menjadi penyebab penyandang disabilitas:

1. Proses kelahiran yang lama, kekurangan oksigen, dan prematur
2. Proses kelahiran yang menggunakan tang verlossih (dengan bantuan Tang)
3. Kelahiran dengan alat bantu vakum

4. Disproporsi sefalopelvik (tulang kemaluan ibu yang kurang proposional)
5. Kehamilan yang terlalu lama > 40 minggu
6. Setelah kelahiran

Penyebab setelah kelahiran yang memicu terjadinya penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Penyakit TBC
2. Penyakit radang selaput otak (Meningitis) dan radang otak (Encephalitis)
3. Kekurangan nutrisi dan gizi
4. Kecelakaan³⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas adalah seorang individu dapat menjadi penyandang disabilitas (difiable) dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai individu tersebut masih dalam kandungan sampai setelah kelahiran. Maka faktor tersebut dapat di bagi menjadi dua faktor, yaitu: pertama, faktor internal, yaitu keturunan, gangguan pada ibu sedang hamil dan sebagainya, dan kedua faktor eksternal, yaitu lingkungan, penyakit, terkena virus, kecelakaan dan lain-lain.

³⁸ Kiki Lestari dan Anisah Zakiah, Kunci Mengendalikan Anak dengan ADHD, (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 2-5.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.³⁹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁴⁰ pada penelitian ini saya menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Cikokol, Kota Tangerang.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis tentang pelayanan sosial Yayasan Difabel Mandiri Indonesia dalam memberdayakan difabel di Kota Tangerang.

³⁹Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 5.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 1.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 08 Desember 2020- 27 Juni 2021 di kantor pusat dan di tempat pelatihan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, adapun yang menjadi responden yaitu ketua Yayasan, salah satu pengurus dan 3 anggota penyandang disabilitas Yayasan Difabel Mandiri Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini saya menggunakan observasi partisipatif pasif yaitu melakukan kunjung ke tempat kegiatan yang diteliti.⁴² Tetapi saya tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, dan dalam penelitian saya melakukan pengamatan dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang saya lakukan di Yayasan Dufabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang.

⁴¹Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014) hal. 65.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 137.

b. Wawancara

Pada umumnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian dan bisa sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.⁴³ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur. Wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang mendalam (*in-depth interview*). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁴⁴

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data dari lapangan dengan cara tanya jawab kepada pengurus dan anggota Yayasan Difabel Mandiri Indonesia dengan membawa pedoman wawancara yang telah disiapkan. Saya melakukan wawancara dengan merekam dan mencatat isi pembicaraan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

⁴³Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014) hal. 31.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015) hal.318.

perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa hasil dari foto survey tempat pelatihan Yayasan Difabel Mandiri Indoneisa Kota Tangerang.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.⁴⁶ Penelitian ini mengambil data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan melalui observasi pengamatan langsung, wawancara dengan responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai kebutuhan suatu penelitian.⁴⁷

⁴⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), cetakan pertama, hal.255.

⁴⁶Sangadji, dkk, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), hal. 171.

⁴⁷Sangadji, dkk, *Metode Penelitian*,..... hal. 172.

Data penelitian tersebut berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis tempat yang diteliti, buku-buku, internet, dan sumber lainnya.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan atau menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan serta bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah analisis data Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴⁹ Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan

⁴⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hal. 92

⁴⁹Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni 2018). Hal. 83

pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*).⁵⁰

Dalam penelitian ini, saya mereduksi data-data yang di kumpulkan dari objek penelitian yaitu Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang yang berupa kegiatan pelayanan sosial dari program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program kewirausahaan ikan tawar dan jangkrik.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, *pie chart*, piktogram, dan sejenisnya.⁵¹ Dalam penyajian data penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut berupa penjelasan mengenai pelayanan sosial Yayasan Difabel Mandiri Indonesia dalam memberdayakan penyandang disabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, serta keberhasilan dari pelayanan sosial tersebut.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

⁵⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2017), cetakan keempat, hal.407-408.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 332.

berikutnya.⁵² Saya memberikan kesimpulan terhadap data yang sudah ada dan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh saya berasal dari kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan melakukan pengamatan saat kegiatan tersebut berlangsung.

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis agar masalah yang sebenarnya dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Di samping itu, masalah yang telah dianalisis lalu di jabarkan dan mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan atau membahas profil Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan, program kegiatan, serta fasilitas dan sarana pendukung Yayasan Difabel Mandiri Indonesia.i

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 334.

BAB III membahas tentang hasil temuan lapangan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia melalui program kewirausahaan budidaya jangkrik dan ikan tawar yang berada di jalan KH. Agus Salim Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang meliputi pelaksanaan program, dan hasil.

BAB IV menjelaskan tentang hasil lapangan dan analisis pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelayanan sosial Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang yang akan di analisis dan di uraikan sebagai hasil dari penelitian. Bab ini dibagi dalam dua sub bab yakni faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelayanan sosial dan perubahan sosial dari pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelayanan sosial Yayasan Difabel Mandiri Indonesia Kota Tangerang.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah dan saran-saran atau rekomendasi.